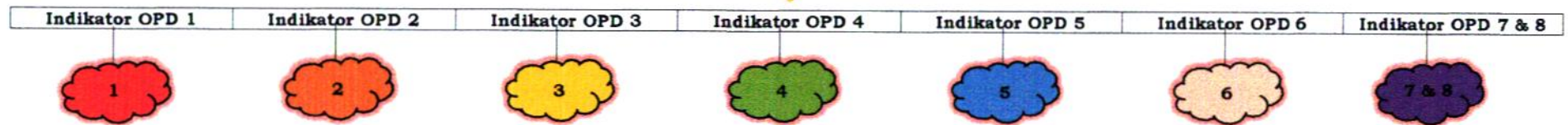


**POHON KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANJARNEGARA**

TUJUAN RPD	
1.	Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
4.	Meningkatnya kualitas layanan publik
INDIKATOR RPD	
1.	Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2.	Indeks pemberdayaan gender
3.	Nilai SAKIP
4.	Survey Kepuasan Masyarakat



TUJUAN OPD	
1.	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2.	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan memperhatikan hak-hak anak
3.	Meningkatnya kinerja instansi Pemerintah
4.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik
INDIKATOR OPD	
1.	Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif
3.	Persentase perempuan di Lembaga Pemerintah
4.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
5.	Kabupaten Layak Anak (KLA)
6.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten
7.	Nilai SAKIP
8.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat





**Persentase penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
4.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
5.	Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota
6.	Persentase keluarga miskin dan rentan yang diintervensi dengan program bantuan sosial

1.

Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial

1.	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota
2.	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota
3.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
4.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
5.	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
6.	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
7.	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota
8.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
9.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota
10.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
11.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
12.	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.

Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA

1.	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/ Kota
2.	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/ Kota
3.	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/ Kota
4.	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/ Kota
5.	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota
6.	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota
7.	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/ Kota
8.	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama antar Lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/ Kota

LANJUTAN INDIKATOR 1

3.	Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/ Kota
1.	Jumlah orang yang mendapatkan permakanaan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/ Kota
2.	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan Kabupaten/ Kota
3.	Jumlah tempat penampungan pengungsian kewenangan Kabupaten/ Kota
4.	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten/ Kota
5.	Jumlah korban bencana pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana kewenangan Kabupaten/ Kota

4.	Jumlah kampung siaga bencana dan TAGANA yang aktif dalam penanganan bencana
1.	Jumlah kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan Kabupaten/ Kota
2.	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan Kabupaten/ Kota

5.	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata
1.	Jumlah fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/ Kota yang didata
2.	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/ Kota
3.	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota
4.	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota



**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
yang aktif**

1. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial

1.

Jumlah PSKS dan masyarakat umum yang mendapatkan sosialisas mekanisme pengumpulan sumbangan uang dan barang serta undian gratis berhadiah

1. Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang

2.

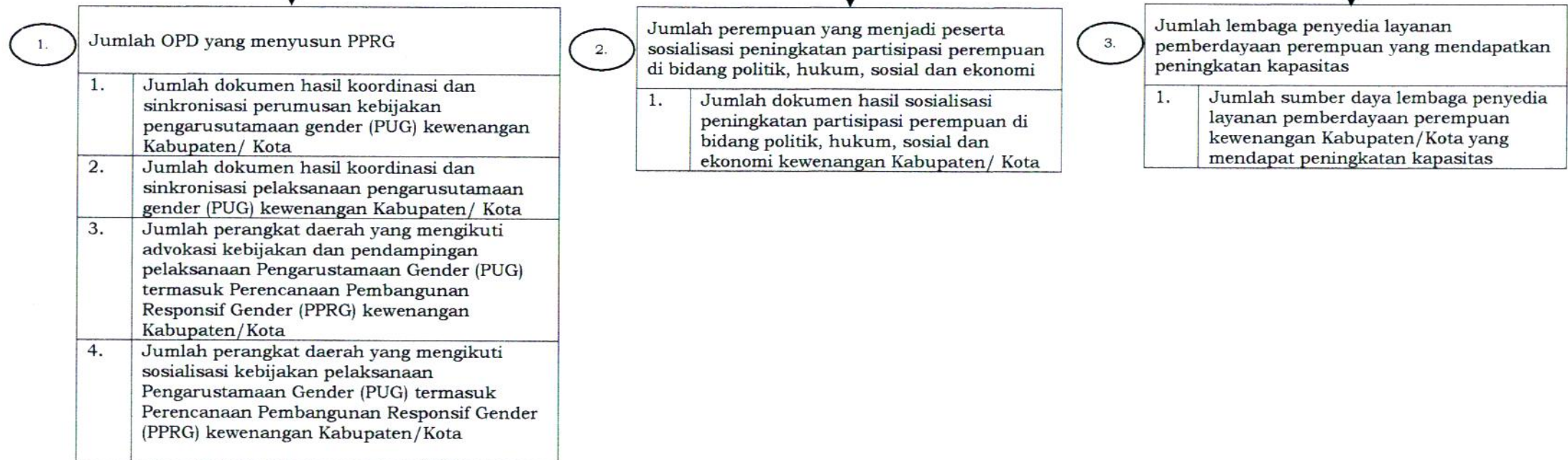
Jumlah PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial

1. Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota
2. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten/ Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota
3. Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota
4. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota
5. Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) kewenangan Kabupaten/ Kota

3

Persentase perempuan di Lembaga Pemerintah

1.	Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD
2.	Persentase kelompok perempuan rentan yang terbentuk
3.	Persentase desa/ kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB
4.	Persentase ketersediaan data berbasis gender di perangkat daerah



LANJUTAN INDIKATOR 3

4.	Jumlah anggota kelompok perempuan rentan yang mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas keluarga
1.	Jumlah laporan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota

5.	Jumlah lembaga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak
1.	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan
2.	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota

6.	Jumlah data gender dan anak yang tersedia di masing-masing OPD
1.	Jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/ Kota yang tersedia



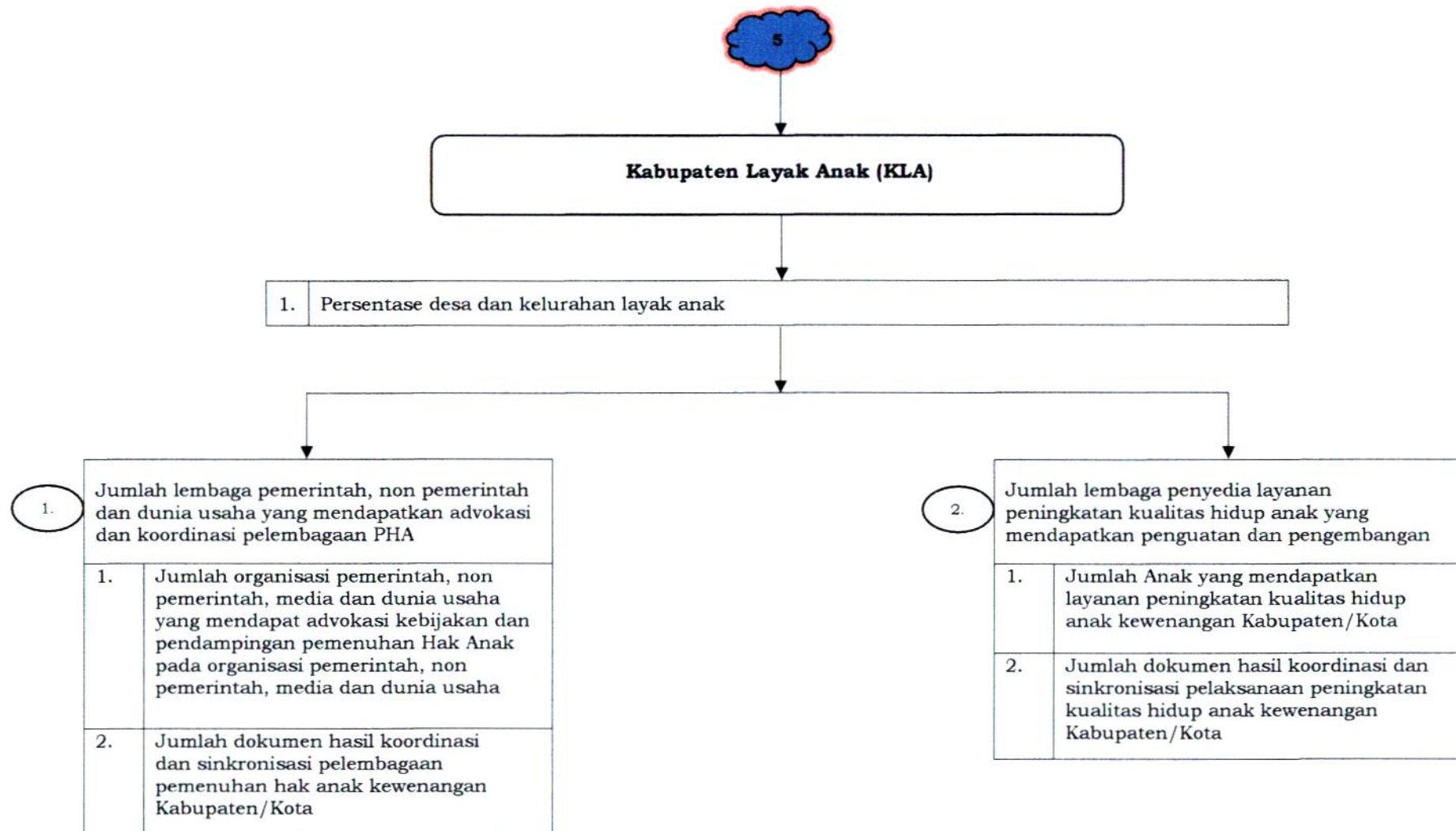
**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO
(per 100.000 penduduk perempuan)**

1. Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu

1.

Jumlah perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai standar

1. Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/ Kota yang mendapatkan layanan pengaduan



6

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten

1. Cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu

1.

Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak

1. Jumlah perangkat daerah advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/ Kota

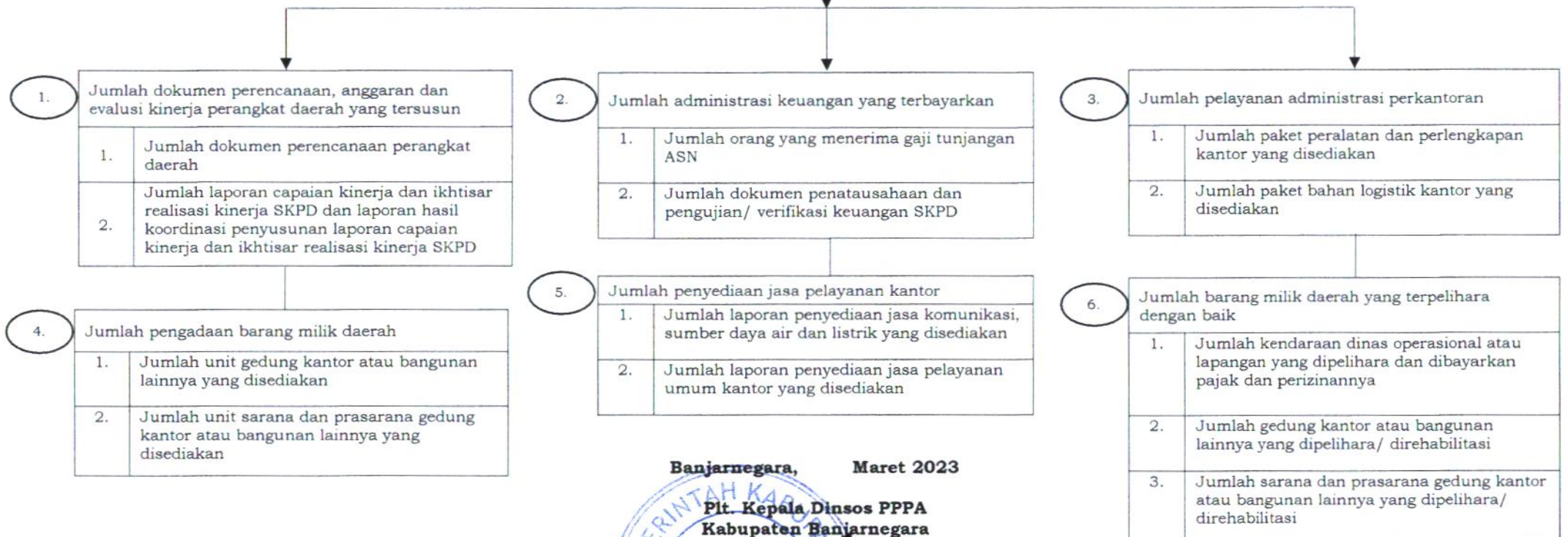
2.

Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terlayani sesuai standar

1. Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan Kabupaten/ Kota

- Nilai SAKIP
- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

1. Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten yang terlaksana



Banjarnegara, Maret 2023

Plt. Kepala Dinsos PPPA
Kabupaten Banjarnegara

Drs. SILA SATRIANA, M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19700903 199003 1 005